

SUMMARY
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA BARAT
(PROVINCIAL GOVERNMENT ACTION PLAN) TAHUN 2011

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari periode kepemimpinan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013, dan sekaligus merupakan penjabaran dari skema Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 merupakan tahun perencanaan kesehatan, dimana pada tahun ini telah dialokasikan anggaran kesehatan sebesar 10% sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selanjutnya, RKPD Tahun 2011 memuat juga rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta perkiraan kerangka pendanaan dan pagu indikatif dalam merespon upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi beserta aspek pemerataannya, penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, meningkatkan daya saing ekspor, peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan serta membangun fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

RKPD Tahun 2011 memuat juga arah kebijakan keuangan daerah, dimana peningkatan pendapatan diupayakan dari peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan, dengan proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2011-2012 adalah sebagai berikut :

Proyeksi APBD Provinsi Jawa Barat T.A. 2011-2012

No.	URAIAN APBD	TAHUN ANGGARAN						
		2009	2010	%	2011	%	2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PENDAPATAN DAERAH	6.942.390.155.500,00	7.757.548.524.262,00	11,74	8.473.804.796.529,00	9,23	9.207.277.276.223,00	8,66
1.	Pendapatan Asli Daerah	5.176.292.473.000,00	5.622.864.544.262,00	0,09	6.496.555.733.729,00	15,54	7.313.108.583.034,00	12,57
	a. Pajak Daerah	4.835.280.000.000,00	5.147.194.809.291,00	0,06				
	b. Retribusi Daerah	28.632.573.000,00	29.142.597.500,00	0,02				
	c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	138.211.462.000,00	204.202.603.139,00	0,48				
	d. Lain-lain PAD yang Sah	174.168.438.000,00	242.324.534.332,00	0,39				
2.	Dana Perimbangan	1.763.254.316.000,00	2.105.354.014.000,00	0,19	1.965.076.625.800,00	(6,66)	1.882.191.339.187,00	(4,22)
	a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	786.016.696.000,00	980.659.774.000,00	0,25				
	b. Pos Dana Alokasi Umum	977.237.620.000,00	1.086.123.940.000,00	0,11				
	c. Pos Dana Alokasi Khusus	-	38.570.300.000,00	-				
3.	Lain-lain Pendapatan yang sah	2.843.366.500,00	29.329.966.000,00	9,32	12.172.437.000,00	(58,50)	11.977.354.002,00	(1,60)
4.	Bagian Pinjaman Pemerintah Daerah							

No.	URAIAN APBD	TAHUN ANGGARAN						
		2009	2010	%	2011	%	2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	BELANJA DAERAH	8.262.578.445.826,00	9.560.556.639.525,54	15,71	8.473.804.796.529,00	(11,367)	9.207.277.276.223,00	8,66
	1. Belanja Tidak Langsung	5.388.574.793.783,75	6.468.835.330.447,54	0,20	5.410.880.600.419,00	(16,35)	6.445.094.093.356,00	19,11
	a. Belanja Pegawai	1.083.681.567.815,00	1.628.776.576.249,54	0,50				
	b. Belanja Bunga	-	-					
	c. Belanja Subsidi	16.050.000.000,00	12.195.120.550,00	(0,24)				
	d. Belanja Hibah	100.306.241.000,00	136.829.361.000,00	0,36				
	e. Belanja Bantuan Sosial	326.735.979.968,75	165.496.000.000,00	(0,49)				
	f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	1.842.907.237.500,00	1.958.495.732.648,00	0,06				
	g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemda/Pemdes	1.928.893.767.500,00	2.492.042.540.000,00	0,29				
	h. Belanja Tidak Terduga	90.000.000.000,00	75.000.000.000,00	-				
	2. Belanja Langsung	2.874.003.652.042,25	3.091.721.309.078,00	0,08	3.562.924.196.110,00	15,24	2.762.183.182.867,00	(22,47)
	a. Belanja Pegawai	384.125.696.850,00	249.308.422.430,00	(0,35)				
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.566.111.018.191,00	1.710.662.535.776,40	0,09				
	c. Belanja Modal	923.766.937.001,25	1.131.750.350.871,60	0,23				

No.	URAIAN APBD	TAHUN ANGGARAN						
		2009	2010	%	2011	%	2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	PEMBIAYAAN	1.310.594.009.826,00	1.803.080.349.495,54	37,58	500.000.000.000,00	(72,27)		
	1. Penerimaan	1.310.761.917.081,00	1.803.008.115.263,54	0,38	500.000.000.000,00	(72,27)		
	a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun Sebelumnya	1.310.761.917.081,00	1.803.008.115.263,54	0,38	500.000.000.000,00	(72,27)		
	b. Penyertaan Modal (investasi) Pemda	-	-	-				
	c. Pembayaran Pokok Utang	-	-	-				
	d. Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-				
	2. Pengeluaran	167.907.255,00	72.234.232,00	-				
	a. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-				
	b. Penyertaan Modal (investasi) Pemda	-	-	-				
	c. Pembayaran Pokok Utang	1.679.072.255,00	72.234.232,00	-				
	d. Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-				
	VOLUME APBD	8.262.746.353.081,00	9.560.628.873.757,54	15,71	8.973.804.796.529,00	(6,14)	9.207.277.276.223,00	2,60

Catatan :

1. APBD 2009 dan APBD 2010 adalah APBD Murni
2. APBD 2011 : Target APBD dengan memperhitungkan SiLPA
3. APBD 2012 : Target APBD sesuai RPJMD Tahun 2008-2013

Proporsi belanja tahun 2011 berdasarkan urusan terbagi menjadi 26 urusan wajib dan 9 urusan pilihan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, fungsi pendidikan sebesar 20% (PMK Nomor 84/PMK.07/2009 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa dana fungsi pendidikan meliputi dana kegiatan fungsi pendidikan formal, non formal dan informal beserta gaji dan tunjangan seluruh penyelenggara pendidikan), fungsi kesehatan diupayakan sebesar 10% (merujuk Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang masih menunggu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pendanaan fungsi kesehatan). Selanjutnya bidang-bidang lainnya disesuaikan dengan prioritas dan kebijakan Gubernur merujuk kepada RPJMD Tahun 2008-2013 termasuk di dalamnya janji Gubernur, sinergi dengan prioritas nasional menurut RPJMN 2009-2014 termasuk di dalamnya kebijakan MDGS, serta kebutuhan pembangunan sesuai dengan perkembangan kebutuhan aktual.

Adapun proporsi belanja kegiatan didalam RKPD tahun 2011 yang telah mengalami upaya optimasi terhadap rencana yang telah ditetapkan, disajikan pada tabel di bawah berikut ini :

Proporsi Indikatif Belanja Kegiatan Tahun 2011 Berdasarkan Urusan

No.	URUSAN	Tahun 2011
		Proporsi Indikatif Belanja Kegiatan
WAJIB		
1	Pendidikan	20,002
2	Kesehatan	10,170
3	Lingkungan Hidup	1,321
4	Pekerjaan Umum	5,558
5	Penataan Ruang	0,043
6	Perencanaan Pembangunan	1,291
7	Perumahan	0,430
8	Pemuda dan Olah Raga	0,281
9	Penanaman Modal	0,185
10	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,058
11	Kependudukan dan Catatan Sipil	0,005
12	Tenaga Kerja	2,180
13	Ketahanan Pangan	0,364
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,179
15	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0,011
16	Perhubungan	0,344
17	Komunikasi dan Informasi	0,517
18	Pertanahan	0,002
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	0,017
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	2,913
21	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1,152
22	Sosial	0,342
23	Kebudayaan	0,451
24	Statistik	0,098
25	Kearsipan	0,028
26	Perpustakaan	0,073

No.	URUSAN	Tahun 2011
		Proporsi Indikatif Belanja Kegiatan
PILIHAN		
1	Kelautan dan Perikanan	0,298
2	Pertanian	2,062
3	Kehutanan	0,021
4	Energi dan Sumber Daya Mineral	0,558
5	Pariwisata	0,408
6	Industri	0,274
7	Perdagangan	0,617
8	Ketransmigrasian	0,005
9	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama	0,247
TOTAL		52,503

Alokasi pembiayaan dalam rangka pencapaian target-target pembangunan, didasarkan atas kriteria alokasi optimis dengan melihat peluang berbagai sumber pembiayaan lainnya, yaitu dana APBN dan sumber dana lainnya selain dari APBD Provinsi, yaitu peran serta dunia usaha (*Corporate Social Responsibility*), hibah, penerbitan surat hutang (obligasi) dan kerjasama pemerintah – swasta (*Publik Private Partnership*).

Arah kebijakan RKPD Tahun 2011 terdiri dari dua belas kebijakan, *Pertama* : Arah Kebijakan pembangunan bidang **Pendidikan** adalah pada : (1) mengupayakan bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan pendidikan menengah; (2) peningkatan kapasitas daya tampung; (3) peningkatan kualitas penyelenggaraan sekolah luar biasa; (4) peningkatan kesiapan penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional dan kejuruan; serta (5) mendorong kemajuan pendidikan tinggi. *Kedua* : Arah Kebijakan pembangunan pembangunan bidang **Kesehatan**, adalah pada (1) pengurangan disparitas layanan kesehatan dan keluarga berencana; (2) Penanganan kesehatan melalui peran multi sektor; (3) Meningkatkan sumberdaya dan mutu layanan kesehatan. *Ketiga* : Kebijakan pembangunan berkaitan dengan isu strategis **Ketahanan Pangan** diarahkan pada : (1) menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas; (2) pemenuhan distribusi pangan masyarakat; (3) optimalisasi potensi agribisnis lokal. *Keempat*: Kebijakan pembangunan dalam rangka **penanganan iklim Usaha dan Investasi** diarahkan pada (1) Penciptaan iklim investasi yang kondusif, jaminan keamanan dan kepastian hukum; (2) penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; (3) mendorong kerjasama dan membuka peluang investasi bagi pihak swasta. *Kelima*: Kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan **Permodalan dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)** diarahkan pada (1) Peningkatan kelembagaan dan dukungan modal usaha bagi KUMKM; (2) peningkatan kualitas pelaku usaha dan produk UMKM; (3) Peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja di sektor UMKM.

Keenam: Arah kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan **Kemiskinan, Pengangguran dan Ketenagakerjaan** diarahkan pada : (1) menumbuhkembangkan budaya masyarakat bekerja; (2) penciptaan lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik di perkotaan maupun di perdesaan; (3) melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap derajat kemiskinan.

Ketujuh: Kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan **Peningkatan Kualitas Layanan Publik** diarahkan pada (1) menyiapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel; (2) menyiapkan SDM yang memiliki daya saing dan kemampuan berkomunikasi; (3) mengimplementasikan *paperless office*, layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) sebagai bagian dari program Jabar *Cyber Province*.

Kedelapan: Kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan **Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Penanganan Bencana** diarahkan pada : (1) merehabilitasi lahan kritis secara massal, terutama di hulu DAS prioritas ; (2) mewujudkan tata ruang untuk pembangunan berkelanjutan sebagai realisasi Jabar *Green Province*; (3) meningkatkan kualitas mitigasi bencana dan penanggulangan korban bencana secara akurat; (4) meningkatkan pengelolaan dan pemrosesan sampah terpadu regional.

Kesembilan: Kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan **Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah** diarahkan pada : (1) membangun infrastruktur jalan untuk membuka pusat-pusat pertumbuhan baru; (2) membangun infrastruktur sumber daya air dan pengembangan jaringan irigasi; (3) membangun infrastruktur energi dan ketenagalistrikan; (4) membangun prasarana dasar permukiman hunian vertikal khususnya di perkotaan.

Kesepuluh: Arah kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan **Pemenuhan Kebutuhan Energi yang Berkelanjutan**, diarahkan pada : (1) konservasi energi dan pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif dan terbarukan; (2) memanfaatkan kondisi alam setempat untuk sumber energi.

Kesebelas: Kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan **Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan** diarahkan pada : (1) meningkatkan kemandirian masyarakat desa untuk beraktifitas di perdesaan; (2) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sejak tahapan perencanaan; (3) menumbuhkembangkan aktifitas perekonomian di perdesaan melalui optimalisasi peran BUMDES.

Keduabelas: Kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan **Budaya Daerah dan Potensi Wisata**, diarahkan pada: (1) pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk pembangunan; (2) menggali potensi-potensi wisata baru di luar wisata alam.

Strategi pembangunan tahun 2011 dioperasionalkan melalui 10 (sepuluh) *Common Goals* (CG) yang terdiri dari 40 (empat puluh) kegiatan tematik, 20 (dua puluh) kegiatan kewilayahan dan kegiatan *Non Common Goals* (Non CG), dengan rincian *common goals* 1 terdiri dari 6 (enam) kegiatan tematik, *common goals* 2 terdiri dari 6 (enam) kegiatan tematik, *common goals* 3 terdiri dari 5 (lima) kegiatan tematik, *common goals* 4 terdiri dari 4 (empat)

kegiatan tematik, *common goals* 5 terdiri dari 5 (lima) kegiatan tematik, *common goals* 6 terdiri dari 4 (empat) kegiatan tematik, *common goals* 7 terdiri dari 2 (dua) kegiatan tematik, *common goals* 8 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan tematik, *common goals* 9 terdiri dari 2 (dua) kegiatan tematik, dan *common goals* 10 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan tematik.

Harapan dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 ini yang pertama adalah semakin terwujudnya sinergitas baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat dan pihak-pihak lainnya (dunia usaha dan masyarakat) dalam penyelesaian permasalahan pembangunan Jawa Barat, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran, serta yang kedua adalah terwujudnya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tertuang dalam target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

	HAL
<i>Summary</i>	i
Daftar Isi	Ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Grafik	xiii
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.1.1. Visi dan Misi Pemerintah Daerah	I - 2
1.1.2. Landasan Hukum	I - 2
1.2. Tujuan, Sasaran dan Fungsi	I - 8
1.2.1. Tujuan	I - 8
1.2.2. Sasaran	I - 8
1.2.3. Fungsi	I - 8
1.3. Pendekatan dan Proses Penyusunan RKPD	I - 9
1.3.1. Pendekatan	I - 9
1.3.2. Proses Penyusunan RKPD	I - 10
1.3.3. Prinsip Penyusunan RKPD	I - 11
1.4. Alur Pikir	I - 11
1.5. Sistematika	I - 12
Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2010	
2.1. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	II - 1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program RKPD Tahun 2010 ...	II - 7
2.2.1. Evaluasi Implementasi Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2010 Terhadap APBD 2010	II - 7
2.2.2. Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2010	II - 9
2.3. Evaluasi <i>Common Goals</i> 2009-2010	II - 29
Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka Pendanaan	
3.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	III - 1
3.1.1. Ekonomi Global	III - 1
3.1.2. Ekonomi Nasional	III - 2
3.1.3. Ekonomi Jawa Barat	III - 5
3.2. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah	III - 12
3.3. Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Pembangunan	III - 24
3.3.1. APBD Provinsi	III - 27
A. Pendapatan Daerah	III - 27
B. Belanja Daerah	III - 31
C. Pembiayaan Daerah	III - 35
3.3.2. Non APBD	III - 38
A. Sumber Pendanaan APBN	III - 38
B. Sumber Pendanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)	III - 41
C. Sumber Pendanaan Partisipasi Swasta dan Masyarakat	III - 42
3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III - 43
3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III - 43
3.4.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III - 48
3.4.3. Proyeksi Kebutuhan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat 2011	III - 51
3.4.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III - 53

Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan

4.1.	Isu Strategis dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011	IV - 1
4.1.1	Isu Strategis	IV - 1
4.1.2	Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011	IV - 13
4.2.	Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011	IV - 15
4.3.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV - 15
4.3.1	Tema Pembangunan	IV - 15
4.3.2	<i>Common Goals</i>	IV - 15
4.3.3	Kewilayahan	IV - 23
4.3.4	<i>Non Common Goals</i>	IV - 25
4.4.	Prioritas Program Pembangunan Daerah	IV - 25

Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2011

5.1.	Rencana Program dan Kegiatan Tematik	V - 1
5.2.	Rencana Program dan Kegiatan Non Tematik	V - 7
5.3.	Matrik Rencana Program dan Kegiatan	V - 8
5.3.1	Matrik Rencana Program dan Kegiatan <i>Common Goals</i>	V - 9
5.3.2	Matrik Rencana Program dan Kegiatan Tematik Kewilayahan	V - 114
5.3.3	Matrik Rencana Program dan Kegiatan <i>Non Common Goals</i>	V - 129

Bab VI	Penutup	VI - 1
---------------	----------------------	---------------

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 2.1. Pencapaian Indikator Pembangunan Jawa Barat Tahun 2004 – 2009	II - 2
Tabel 3.1. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2010 – 2011 (dalam %)	III - 3
Tabel 3.2. Proyeksi Makro Ekonomi Jawa Barat 2010 – 2011	III - 10
Tabel 3.3. Nilai Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat atas Dasar Harga Berlaku dan Peranan NTB setiap Sektor dalam Perekonomian Jawa Barat Tahun 2007 – 2009	III - 11
Tabel 3.4. Karakteristik Perekonomian Jawa Barat	III - 15
Tabel 3.5. Target Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011	III - 25
Tabel 3.6. Perbandingan Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 dan UU Nomor 28 Tahun 2009	III - 26
Tabel 3.7. Perkembangan Dana Pembangunan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2010	III - 27
Tabel 3.8. Perkembangan Target dan Realisasi PAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2010	III - 28
Tabel 3.9. Perkembangan Realisasi PAD dalam APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2009	III - 28
Tabel 3.10. Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2010	III - 29
Tabel 3.11. Perkembangan target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2010	III - 30
Tabel 3.12. Perkembangan Realisasi Total Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2009	III - 31
Tabel 3.13. Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2010	III - 32
Tabel 3.14. Perkembangan Realisasi Alokasi Belanja Daerah Tahun 2004 - 2008 Dibandingkan dengan APBD Tahun 2005 – 2009	III - 32
Tabel 3.15. Perkembangan Realisasi Rincian Belanja Tahun 2004 – 2008	III - 34
Tabel 3.16. Perkembangan Realisasi Pembiayaan Tahun 2005 – 2009	III - 38
Tabel 3.17. Jumlah Dana APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Barat tahun 2005 – 2009	III - 39
Tabel 3.18. Alokasi Dana Dekonsentrasi berdasarkan OPD di Provinsi Jawa Barat	III - 40
Tabel 3.19. Alokasi Dana Tugas Pembantuan untuk Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010	III - 41
Tabel 3.20. Rekap DIPA Tahun 2009 Provinsi Jawa Barat Tahun 2009	III - 42
Tabel 3.21. Alokasi Dana PHLN berdasarkan Kementerian di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009	III - 42
Tabel 3.22. Proyeksi APBD Provinsi Jawa Barat T.A. 2011-2012	III - 45
Tabel 3.23. Proporsi Belanja RKPD Tahun 2011 Berdasarkan Urusan	III - 52

DAFTAR GAMBAR

	HAL
Gambar 1.1	Bagan Alur Proses Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 I – 9
Gambar 1.2	Kerangka Pemikiran Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 I – 10
Gambar 2.1	Keterkaitan Sasaran OPD dengan sasaran CG RKPD Tahun 2009 II – 29
Gambar 2.2	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Pencapaian Sasaran OPD.. II – 31
Gambar 3.1	Perkembangan dan Proyeksi Ekonomi Jawa Barat Tahun 2011 III - 13
Gambar 3.2	Proporsi Pendapatan Daerah III - 30
Gambar 3.3	Proporsi Rata-Rata Realisasi Belanja Daerah 2005 – 2009 III - 33
Gambar 3.4	Skema Pembiayaan dan Pinjaman Daerah III - 36

DAFTAR GRAFIK

		HAL
Grafik 2.1	Empat Kelompok Utama Pembangunan Dalam APBD 2010...	II - 8
Grafik 2.2	Keterkaitan Sasaran Program CG dengan OPD	II - 31
Grafik 2.3	Alokasi Pendanaan Common Goals Tahun 2009 yang bersumber dana dari APBD Provinsi Tahun 2009	II - 32
Grafik 2.4	Alokasi Pendanaan Common Goals Tahun 2010 yang bersumber dana dari APBD Provinsi Tahun 2010	II - 32